



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 6 (2022), pp.1905-1936

DOI: 10.15408/sjsbs.v9i6.27756

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Fenomena Pedagang Kaki Lima sebagai Solusi Ekonomi Masyarakat Urban di Tengah Masifnya Pembangunan Ruang-Ruang Perkotaan: Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Sekitar Grand Depok City dan Margonda Raya Tahun 2020-2021*

Aniqotul Ummah¹, Fathurahman Saleh², Bilal Sukarno³

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta



[10.15408/sjsbs.v9i6.27756](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i6.27756)

Abstract

Urbanization in general view is the process of mass migration of residents from rural areas to urban areas. Urbanization also is seen as a process in the city that is identified with the development of urban spaces and also affects various aspects of the social community. The massive development of urban spaces opens up a gap among the citizens, where some minority communities such as the poor, choose to work in the informal sector in search of the most basic livelihoods. However, the problem lies in how they use urban spaces as a place where they sell, such as street vendors who use various spaces within the city. This study tries to analyze the extent of urban space utilization by street vendors around Grand Depok City and Margonda Raya Year 2020-2021, using the theory of space production from Henry Lefebvre. The research concluded that the utilization of city space used by street vendors in the vicinity of Grand Depok City and Margonda, occurred because they did not have the money to rent a place for selling activity. In line with the theory of space from Lefebvre, the use of urban space as a place to sell their products on street vendors occurs because at the level of conceived space facing the reality of lived space, it will always leave residues that are the problem of using space such as parks, sidewalks, and so on, to sell.

Keywords: Urban Community; Economic Solution; Development of Urban Spaces

Abstrak

Urbanisasi dalam pandangan umum merupakan proses perpindahan penduduk secara masif dari kawasan pedesaan ke perkotaan. Urbanisasi juga dapat dilihat sebagai proses dalam kota yang diidentikkan dengan pembangunan pada ruang-ruang kota dan turut memengaruhi berbagai aspek dalam sosial masyarakat. Masifnya pembangunan pada ruang kota membuka jurang kesenjangan antar warga kota, di mana beberapa masyarakat minoritas seperti masyarakat miskin memilih bekerja pada sektor informal untuk mencari penghidupan yang paling dasar. Namun, masalahnya adalah bagaimana mereka menggunakan ruang perkotaan sebagai tempat mereka berjualan, seperti pedagang kaki lima yang menggunakan berbagai ruang dalam kota? Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan studi kepustakaan, penelitian ini mencoba untuk menganalisis sejauh mana pemanfaatan ruang perkotaan oleh pedagang kaki lima di sekitar Grand Depok City dan

*Received: Mei 12, 2022, Revision: June 25, 2022, Published: November 23, 2022.

¹ **Aniqotul Ummah** adalah Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial UPN Veteran Jakarta, Email: aniqotul.ummah@upnvj.ac.id

² **Fathurahman Saleh** adalah Mahasiswa Ilmu Politik di Fisip UPN Veteran Jakarta

³ **Bilal Sukarno** adalah Mahasiswa Ilmu Politik di Fisip UPN Veteran Jakarta

Margonda Raya Tahun 2020-2021, dengan menggunakan teori produksi ruang dari Henry Lefebvre. Adapun penelitian ini berkesimpulan bahwa, pemanfaatan ruang kota digunakan oleh para pedagang kaki lima di sekitar Grand Depok City dan Margonda terjadi karena mereka tidak mempunyai modal untuk menyewa tempat berjualan. Sejalan dengan teori ruang dari Lefebvre, pemanfaatan ruang perkotaan sebagai tempat berjualan oleh pedagang kaki lima terjadi karena ruang yang dikonsepsikan (*conceived space*) berhadapan dengan kenyataan dari ruang yang hidup, maka akan selalu meninggalkan residunya yakni permasalahan penggunaan ruang seperti taman, trotoar, dan sebagainya, untuk berjualan.

Kata Kunci: Masyarakat Urban; Solusi Ekonomi; Pembangunan Ruang Perkotaan

A. PENDAHULUAN

Proses urbanisasi tidak dapat begitu saja diartikan sebagai perpindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi adalah serangkaian proses pembangunan kota yang di dalamnya meliputi pengembangan terhadap ruang kota, infrastruktur, demografi, dan kerap berujung pada pemusatan penduduk di sebuah kota. Urbanisasi yang dianggap sebagai indikator kemajuan kota, nyatanya berdampak signifikan terhadap masyarakat dalam kota itu sendiri, baik dari segi politik, sosial-budaya, hingga perekonomian. Proses urbanisasi dalam sebuah kota di negara dunia ketiga, biasanya sarat akan kepentingan modal, di mana dominasi atas ruang-ruang di kota berada di bawah tangan kelompok kapitalis, yang lebih melihat ruang-ruang dalam kota sebagai *exchange value* atau nilai tukar daripada *use value* atau nilai guna, yang bermuara pada pendapatan profit untuk para kapitalis.

Henri Lefebvre⁴ dalam bukunya, *The Production of Space* tahun 1974 dengan gamblang menyatakan bahwa ada keterkaitan antara kapitalisme dan ruang. Kapitalisme memiliki banyak aspek, di antaranya yang disebut Lefebvre sebagai *landed capital*, *finance capital*, dan berbagai jenis *capital* lainnya, yang bersama dengan berbagai pasar yang tumpang tindih sampai dengan komoditas, tenaga kerja, pengetahuan, tanah, dan lainnya, membentuk sebuah sistem yang disebut kapitalisme. Namun ada satu aspek lain dalam kapitalisme dan terkadang dilupakan, yakni hegemoni dari satu kelas yang superior terhadap kelas yang inferior. Hegemoni yang diperkenalkan oleh Gramsci⁵ tersebut digunakan oleh Lefebvre untuk menganalisa tindakan kaum borjuis, khususnya keterikatan mereka dengan ruang. Lefebvre juga menjelaskan bahwa yang dimaksud 'ruang' itu tidak ada yang sepenuhnya ideal, karena ia adalah arena pertentangan yang tidak akan pernah selesai untuk diperebutkan. Semua pihak akan terus menerus mencari cara untuk memperebutkan dan mendominasi ruang dan memproduksi segala pengetahuan untuk mempertahankan hegemoni mereka atas ruang tersebut. Lefebvre juga mencoba memberi kita sebuah pandangan baru mengenai ruang itu dengan memperkenalkan konsep *triadic of space* yang berisikan rangkaian konseptual ruang secara dialektika, dan satu sama lain saling memengaruhi.

⁴ Henry Lefebvre, *The Production of Space; Translated by Donald Nicholson, Urban Studies*, (Oxford: Basil Blackwell, 1991).

⁵ Arie Setyaningrum Pamungkas, "Produksi Ruang Dan Revolusi Kaum Urban Menurut Henri Lefebvre," 2016, <https://indoprogress.com/2016/01/produksi-ruang-dan-revolusi-kaum-urban-menurut-henri-lefebvre/>.

Dalam penelitian ini, penulis ingin menggunakan teori ruang dari Lefebvre ini untuk menganalisis lebih jauh tentang makna ruang pada perkotaan, yang nantinya akan penulis kaitkan dengan fenomena pedagang kaki lima. Adapun penelitian terdahulu yang sudah dilakukan dengan topik tersebut, yakni jurnal ilmiah dari Ni Nyoman Tirta Yamuna, I Nengah Punia, dan Ni Made Anggita Sastri Mahadewi pada tahun 2019 yang berjudul *Produksi Ruang Sosial Pedagang Kaki Lima di Lapangan Niti Mandala Denpasar*. Penelitian tersebut melihat bahwa secara konseptual ada dua dimensi yang membentuk produksi PKL. Pertama, sosialisasi dan interaksi antara PKL dengan acara selain PKL lainnya. Kedua, lapangan Niti Mandala Renon sebagai tempat mencari nafkah. Penelitian tersebut menjelaskan konsep *triadic of space* dari Lefebvre yang dapat digunakan untuk menganalisis fenomena tersebut. Pedagang kaki lima menggunakan ruang publik untuk berjualan dan bukan untuk tempat atau sarana rekreasi. Ini berbeda dari fungsi awalnya, manakala para *urban planners*, arsitek, serta pemerintah setempat mengkonstruksikan lapangan tersebut pada tingkat representasi ruang atau *conceived space*, ditujukan untuk taman sebagai tempat rekreasi masyarakat kota, bukan tempat berjualan.⁶

Penelitian ini akan menggunakan Teori Produksi Ruang. Teori ini berfokus pada bagaimana proses urbanisasi yang masif pada ruang-ruang perkotaan turut berdampak terhadap masyarakat miskin kota. Salah satunya pedagang kaki lima yang mencoba mencari penghidupan dengan berjualan di ruang-ruang publik kota. Kerap kali pedagang kaki lima ini dianggap sebagai penghancur imaji ideal kehidupan kota karena berjualan di pinggir-pinggir trotoar, di depan gedung, dan sebagainya, dan kerap diusir dan dipersekusi oleh satuan polisi pamong praja. Ini nampak benar karena penertiban yang dilakukan bertujuan agar para pedagang kaki lima ini tidak menghalangi para pengguna jalan. Namun, apakah hal tersebut memang benar dan manusiawi? Notabene mereka hanyalah rakyat kecil yang masih termasuk ke dalam warga kota, dan mereka juga terkena dampak dari urbanisasi yang terlalu cepat, sedangkan mereka tidak bisa bersaing di dalamnya. Adapun beberapa pertanyaan yang diajukan penulis adalah; *pertama*, Bagaimana keterkaitan antara urbanisasi dan masyarakat miskin kota? *kedua*, Bagaimana fenomena munculnya pedagang kaki lima dilihat dari teori produksi ruang di kawasan sekitar Grand Depok City dan Margonda Raya Tahun 2020-2021? *Ketiga*, Bagaimana seharusnya kebijakan ideal dari pemerintah kota terhadap pedagang kaki lima?

Kerangka Teori

Teori Produksi Ruang

Henri Lefebvre menyatakan bahwa ruang tidak dapat ditelan mentah-mentah dalam arti ruang secara spasial. Lefebvre menggagas konsep ruang sebagai bentuk sosial atau '*sosial space*' dengan menggabungkan dua pemikiran ruang dari Des Cartes yang

⁶ Ni Nyoman Tirta Yamuna, I Nengah Punia, and Ni Made Anggita Sastri Mahadewi, "Produksi Ruang Sosial Pedagang Kaki Lima Di Lapangan Niti Mandala Renon Denpasar," *Jurnal Ilmiah Sosiologi (SOROT)* 1, no. 2 (2019): 1-12, <https://erepo.unud.ac.id/id/eprint/33246>.

melihat ruang dengan absolut, dan ruang menurut Kant yang menilai sebagai kesadaran tersendiri bagi si subjek dan tidak absolut. Menurutnya, ruang sosial itu berisi berbagai macam kegiatan sosial secara individu maupun kolektif, dari siapa yang melahirkan dan meninggal, dan dari yang diam sampai yang bertindak. Hal ini menunjukkan bahwa ruang sosial terbentuk oleh kegiatan sosial itu sendiri. Namun di sisi lain, ruang juga bisa diproduksi oleh beberapa aktor seperti *urban planners*, arsitek, politisi, hingga para kapitalis. Di sini seakan terlihat bahwa ruang, dalam bentuk sosial ataupun spasial, sesungguhnya di dalamnya terjadi perebutan dan mengagregasikan kepentingan dari banyak pihak, di mana menurut Lefebvre, ruang di bawah kapitalis digunakan untuk melakukan dominasi dan hegemoni pengetahuan.

Lefebvre menyajikan kerangka konseptual agar kita dapat melihat ruang sosial secara dialektis, yakni; (i) *Spatial Practice*, (ii) *Representation of Space*, dan (iii) *Representational of Space*.

Di tingkat yang disebut Lefebvre sebagai *Spasial Practice* atau praktik spasial, berisi produksi dan reproduksi dari kegiatan masyarakat dalam konteks spasial. Artinya, di tingkat ini, ruang didefinisikan sebagai interelasi dari hubungan masyarakat yang sebenarnya sudah ada dalam konteks spasial. Namun, kegiatan dan hubungan masyarakat itulah yang menjadikan ruang itu ada, secara spasial ataupun sosial.

Representation of Space, menurut Lefebvre merujuk pada ruang yang dikonsepsikan (*conceived space*), di mana para *urban planners*, arsitek, politisi, dan para kapitalis mengambil bagian pada tingkat ruang ini yang nantinya diproyeksikan ke dalam ruang yang nyata dan hidup, yakni *representational space*. Ilmu-ilmu tentang kota, fetisisme terhadap keindahan dan visualisasi, terus dimainkan dalam ruang ini, sehingga keberadaan ruang hanyalah sebagai komoditas semata. Pada tataran ini, ruang hanyalah sesuatu yang abstrak (*abstract space*).

Representational Space menurut Lefebvre adalah ruang yang nyata, dia hidup dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Ruang ini disebut juga sebagai ruang yang dipersepsikan atau *perceived space*, di mana ruang pada tingkat ini ada karena sebelumnya sudah dikonsepsikan oleh beberapa aktor pada *conceived space* tadi, sehingga sebuah ruang di perkotaan dapat dirujuk dan diketahui itu ruang apa, karena masyarakat telah mempunyai persepsi atas ruang-ruang tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif di mana penelitian ini memusatkan diri pada kegiatan ontologis. Data yang dikumpulkan terutama berbentuk kata-kata, kalimat, atau gambar yang memiliki makna dan mampu memicu timbulnya pemahaman yang lebih nyata daripada sekedar angka, atau frekuensi.⁷ Peneliti menekankan catatan dengan deskripsi kalimat yang terperinci, lengkap, mendalam, dan pula menggambarkan situasi yang sebenarnya guna

⁷ Nugrahani Farida, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta, 2014).

mendukung penyajian data. Selain itu menurut Nassaji⁸, penelitian deskriptif melibatkan data yang natural yang memiliki arti menganalisis suatu fenomena yang terjadi secara alami tanpa adanya intervensi ataupun manipulasi variabel, yang berarti peneliti berusaha untuk menganalisis data dalam berbagai nuansa sesuai dengan bentuk aslinya, sesuai dengan saat data-data dikumpulkan.

Pada pengumpulan datanya, penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan atau *library research* di mana menurut Zed⁹, studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Menurutnya pula, studi kepustakaan mempunyai beberapa ciri utama yang di antaranya sebagai berikut; (i) peneliti berhadapan langsung dengan teks atau naskah; (ii) data pustaka bersifat *ready to use*; (iii) data pustaka umumnya merupakan sumber sekunder yang berarti data penelitian diperoleh dari tangan kedua; dan yang terakhir (iv) kondisi data pustaka tidak dibatasi ruang dan waktu yang artinya data tersebut tidak akan berubah karena tersimpan dalam bentuk tertulis. Dengan begitu, penulis tidak secara langsung terjun ke lapangan, namun mengandalkan data-data yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, artikel yang kredibel, peraturan perundangan, serta literatur lain yang mendukung rampungnya jurnal ini.

Pencarian data menggunakan mesin pencarian (*search engine*) *google scholar* karena dianggap ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan. Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisis oleh penulis dan digunakan penulis untuk mendukung argumen serta pemikiran penulis untuk menjawab dan menjelaskan hubungan serta keterkaitan tentang topik yang diangkat, dan akan dituangkan penulis pada bagian pembahasan. Penulis berharap agar tulisan ini dapat dijadikan referensi bagi para akademisi yang mempunyai latar belakang yang sama seperti penulis, maupun digunakan untuk sekadar menambah pengetahuan mengenai teori produksi ruang dari Henri Lefebvre, serta fenomena pedagang kaki lima di tengah masifnya pembangunan pada ruang kota.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Urbanisasi dan Masyarakat Miskin Kota

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi dari urbanisasi ialah perpindahan penduduk secara berduyun-duyun dari desa (kota kecil, daerah) ke kota besar¹⁰. Dalam pandangan umum, urbanisasi merupakan sebuah aktivitas di mana terjadi perpindahan suatu individu maupun kelompok tertentu dari daerah pedesaan menuju daerah perkotaan. Urbanisasi dilakukan oleh berbagai individu maupun suatu kelompok tertentu tentunya karena beberapa faktor pendorong dan penarik. Faktor pendorong individu ataupun kelompok tertentu melakukan urbanisasi adalah adanya

⁸ Hossein Nassaji, "Qualitative and Descriptive Research: Data Type versus Data Analysis," *Language Teaching Research* 19, no. 2 (2015): 129–32, <https://doi.org/10.1177/1362168815572747>.

⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).

¹⁰ KBBI, "Urbanisasi KBBI," <https://kbbi.web.id/urbanisasi>.

dorongan dari faktor eksternal yang membuat seseorang berpikir bahwa adanya urbanisasi dapat mengatasi kemiskinan dan membawa kesejahteraan dalam hidup mereka. Sedangkan, faktor penarik merupakan sebuah faktor di mana individu-individu maupun kelompok tertentu melakukan urbanisasi karena adanya kelebihan dan keuntungan di kota tertentu yang mengakibatkan seseorang memilih untuk pindah dari wilayah desa yang sedang mereka tempati. Urbanisasi itu sendiri umumnya dapat terjadi karena antara lain untuk mengatasi kemiskinan, mendapatkan taraf kesehatan maupun pendidikan yang layak dan salah satunya untuk memperbaiki kondisi ekonomi seseorang ataupun kelompok tertentu.

Berbicara mengenai urbanisasi, tidak etis bila kita hanya memandangnya hanya sebagai aktivitas perpindahan penduduk dengan segala konsekuensi logis dari padanya, namun kita juga harus melihat sedikit ke belakang, bagaimana fenomena ini dapat terjadi dan dapat memengaruhi kelompok minoritas perkotaan seperti masyarakat miskin kota. Bersinggungan dengan urbanisasi yang ditengarai sebagai proses perpindahan penduduk dari desa ke kota, David Harvey mempunyai pandangan yang berbeda.

“The 'thing' we call a 'city' is the outcome of a 'process' that we call 'urbanization'. But in examining the relationship between processes and things, there is a prior epistemological and ontological problem of whether we prioritize the process or the thing and whether or not it is even possible to separate the process from the things embodied in it. (a) processes are regarded as in some ways more fundamental than things and (b) processes are always mediated through the things they produce, sustain and dissolve.”¹¹

Harvey melihat bahwa kota merupakan sebuah *'thing'* yang terbentuk melalui proses yang dinamakan urbanisasi. Menurutnya pula, urbanisasi tidak bisa hanya diterima sebagai entitas kegiatan sosio-organisasional, namun hal tersebut merupakan sebuah proses produksi yang spesifik dari bentuk spasial yang heterogen yang di dalamnya berisi berbagai macam tindakan sosial. Dalam kacamata David Harvey yang punya latar belakang pemikiran Marxis, proses urbanisasi itu tidak lebih dari kegiatan para kapitalis untuk mencari profit. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Jika kita merujuk pada esainya, *Right to The City*¹², kita dapat melihat argumen Harvey yang begitu tegas menyindir para kapitalis dalam kegiatan urbanisasi. Ia mendasarkan pandangannya dari argumen seorang sosiolog Robert Park yang mempertanyakan sebuah kota yang ditinggali manusia apakah dibentuk oleh manusia sesuai dengan yang diinginkan, atau telah dibentuk dan manusia terpaksa untuk hidup di dalam kota tersebut. Harvey menyitir Robert Park sebagai berikut;

"Man's most consistent and on the whole, his most successful attempt to remake the world he lives in more after his heart's desire. But, if the city is the world that man created, it is the world in which he is henceforth condemned to live. Thus, indirectly, and without any clear sense of the nature of his task, in making the city man has remade himself"¹³

¹¹ David Harvey, "Cities or Urbanization?," *City* 1, no. 1-2 (1996): 38-61, <https://doi.org/10.1080/13604819608900022>.

¹² David Harvey, "The Right to the City. In D. Simpson, V. Jensen & A. Rubing (Ed.)," *The City between Freedom and Security*, 2017, <https://doi.org/https://doi.org/10.1515/9783035607611-014>.

¹³ Harvey.

Harvey mempertanyakan proses urbanisasi selama hampir ratusan tahun ke belakang, apakah proses urbanisasi tersebut berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat? Menurut Harvey, kota dalam pandangan kapitalis manakala secara geografis maupun sosial, hanya dilihat sebagai produk surplus. Kapitalis membutuhkan proses urbanisasi agar bisa mencetak profit lewat penjualan produk surplusnya di dalam kota. Hal ini yang menyebabkan urbanisasi selalu menemui masalahnya sendiri tatkala di dalam proses tersebut hanya diperuntukkan untuk segelintir orang saja. Di kala masifnya pembangunan pada ruang-ruang dalam kota akibat proses urbanisasi, ada beberapa masyarakat dalam kota yang tidak dapat mengimbangi kecepatan proses tersebut.

Jika kita melihat betapa kesenjangan kehidupan dalam kota hari ini, di mana kota sekelas DKI Jakarta mempunyai sisi gelap terhadap kemiskinan, maka hal yang akan terjadi adalah, urbanisasi yang dirancang tersebut memunculkan gap yang besar di antara penduduk kotanya.

Tabel 1.1 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020



Sumber: Statistik Sektoral Provinsi DKI Jakarta

Data di atas menunjukkan Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan di DKI Jakarta berdasarkan wilayah administrasi, di mana pada Indeks Kedalaman Kemiskinan dalam hal ini mengartikan bahwa, nilai rerata kesenjangan pengeluaran dari setiap penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dan ketika semakin tinggi nilai indeksnya, maka semakin jauh rerata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan yang ditunjukkan dengan P1, dan Indeks Keparahan Kemiskinan yang ditunjukkan dengan P2. Diketahui bahwa Kepulauan Seribu merupakan daerah dengan P1 dan P2 tertinggi yang mengartikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kepulauan Seribu tertinggi diantara wilayah lainnya. Jakarta Selatan mempunyai garis kemiskinan

tertinggi dari wilayah lain dengan Rp 782.731 kapita perbulan yang menunjukkan bahwa biaya hidup di wilayah Jakarta Selatan lebih tinggi dari wilayah lain.¹⁴

Fakta ini tidak sesuai dengan para pemikiran para kelompok urban, bahwa urbanisasi dinilai dapat mengakibatkan peningkatan taraf pengangguran dan kemiskinan yang semakin meningkat di daerah perkotaan. Yang terjadi malah menjadi bumerang untuk beberapa kalangan. Pandangan umum yang sering kita dengar ialah, hal tersebut ditengarai akibat rendahnya taraf pendidikan para kelompok urban tersebut yang mengakibatkan tidak tersedianya lapangan pekerjaan dan mengharuskan mereka menjadi pengangguran di daerah perkotaan.¹⁵ Untuk di satu sisi kita dapat mengatakan hal tersebut benar, namun bagaimana jika nyatanya tidak? Bagaimana jika ternyata urbanisasi hanya dibentuk dan diperuntukkan untuk beberapa kalangan saja seperti kapitalis? Maka salah satu jalan keluarnya adalah, warga kota menengah ke bawah akan mencoba bertahan hidup di kota dengan beralih ke sektor informal. Hal ini sesuai dengan perkataan dari Portes dan Hoffman yang melihat dampak dari liberalisasi ekonomi di Amerika Latin. Mereka menyebutkan, sejalan dengan liberalisasi ekonomi, justru terjadi peningkatan sektor informal di dalam ekonomi negara-negara tersebut.¹⁶

Menurut Simanjuntak¹⁷, sektor tersebut telah berkontribusi dan berperan dalam menjawab pertanyaan mendasar tentang proses pembangunan ekonomi dan perubahan sosial. Bahkan di saat perlambatan ekonomi, sektor informal dapat bertindak sebagai katup pengaman. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi dalam rangka pemerataan kesempatan kerja dan kesempatan pertumbuhan ekonomi sudah sepantasnya dirangsang dari bawah ke atas, terutama yang bergerak di sektor industri kecil di perdesaan dan sektor informal di perkotaan. Dalam konteks perkotaan, biasanya masyarakat menengah ke bawah dalam kegiatannya pada sektor informal, kerap menggunakan ruang-ruang kota sebagai tempat mereka berdagang. Hal ini kerap dilakukan para pedagang kaki lima yang menggunakan taman, di depan bangunan mewah dalam kota seperti di depan mal, tidak jarang juga ada di pinggir jalan dan trotoar. Bagaimana hal ini dapat terjadi?

2. Pemanfaatan Ruang Publik Oleh Pedagang Kaki Lima di Sekitaran Grand Depok City dan Margonda Raya Tahun 2021

Sebelum kita masuk kepada penggunaan ruang-ruang publik perkotaan oleh pedagang kaki lima, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu teori ruang dari Lefebvre sebagaimana yang dia nyatakan dalam bukunya *The Production of Space* Tahun 1974. Lefebvre mengatakan awalnya istilah ruang itu cenderung matematis, dia

¹⁴ Statistik Sektoral Provinsi DKI Jakarta, "Penduduk Miskin Di DKI Jakarta Tahun 2020," 2021, <https://statistik.jakarta.go.id/penduduk-miskin-di-dki-jakarta-tahun-2020/>.

¹⁵ Nurul Widyaningrum, "Kota Dan Pedagang Kaki Lima," *Jurnal Analisis Sosiak* 14, no. 1 (2015): 1-18.

¹⁶ Widyaningrum.

¹⁷ Freddy Kurniawan, "Pola - Pola Pemanfaatan Trotoar Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan Mangga Besar – Jakarta," *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan* 3, no. 1 (2019): 171, <https://doi.org/10.24912/jmstik.v3i1.2842>.

terikat dengan pemahaman secara geometris dan biasanya para akademisi menggunakan istilah ruang dengan julukan 'Euclidian', 'isotropic' atau 'infinite' yang lebih cenderung kearah matematika, dan sepertinya menurut Lefebvre, mengistilahkan ruang sebagai bentuk sosial itu agak aneh. Namun Des Cartes mengulik lagi pemahaman ruang secara filosofis. Menurut pemikiran Cartesian, istilah ruang itu absolut, manakala objek berlawanan dengan subjek, *res extensa* berlawanan dengan *res cogitans*, dan ruang, mendominasi kedua aspek tersebut. Pada konsep ruang Kantian yang tidak setuju dengan konsep ruang seperti itu, mencoba merubah *old notion space*, di mana menurut Kantian *Space*, ruang bersamaan dengan waktu, itu terpisah dari lingkup empiris, dia adalah kesadaran tersendiri bagi si subjek. Lefebvre mengatakan bahwa dua hasil pemikiran itu tidak bisa dikatakan usang, lebih jauh Lefebvre menggabungkan 2 pemikiran tersebut untuk alat analisis dalam konsep ruangnya yakni '*social space*'.¹⁸

Michel Foucault juga turut memberikan pandangan tentang '*space*', di mana menurutnya, *knowledge (savoir)* juga merupakan ruang di mana subjek (seorang pemikir) itu mengambil satu sikap atau posisi untuk berbicara tentang objek dalam sebuah diskursusnya. Lama berdebat tentang pemaknaan ruang dalam diskursus Lefebvre, dia mengingatkan kembali tentang sebuah ilmu yang disebut sebagai *semiology* yang berisi penyimbolan terhadap sesuatu. Di sini Lefebvre mulai mempertanyakan, jika kode atau simbol yang dihasilkan dari buku bacaan tersebut diaplikasikan, lantas apakah kode atau simbol ini memungkinkan untuk ruang itu tidak hanya sekedar dibaca, namun dapat dikonstruksikan atau dibentuk? Hal ini dirujuk Lefebvre karena pada abad-19, muncul sebuah kode pada sebuah bangunan arsitektural, *urbanisitic and political, constituting a language common to country people and townspeople, to the authorities and to artists*.¹⁹

Lefebvre sebenarnya ingin mencari keabsahan tentang ruang sebagai bentuk sosial atau *social space*, di mana menurutnya mempunyai kaitan yang tidak jauh dari ilmu pengetahuan yang dibawa pemikir-pemikir sebelumnya tentang '*space*'. Lantas dia sekali lagi mengangkat tentang ilmu *semiology* dengan perkataan sebagai berikut:

"Everyone knows what is meant when we speak of a 'room' in an apartment, the 'corner' of the street, a 'marketplace', a shopping or cultural 'centre', a public 'place', and so on. These terms of everyday discourse serve to distinguish, but not to isolate, particular spaces, and in general to describe a social space. They correspond to a specific use of that space, and hence to a spatial practice that they express and constitute."

Menurut Lefebvre, hanya Nietzsche yang masih mengedepankan sikap primordialnya mengenai konsep ruang, di mana konsep ruang menurut Nietzschean, tidak seperti satu pandangan ruang oleh Hegelian yang melihat ruang sebagai produk dan residu dari sejarah manusia. Lefebvre menyitir perkataan Nietzsche yang mengatakan, '*I believe in absolute space as the substratum of force: the latter limits and forms*'. Lefebvre turut menyimpulkan bahwa ruang kosmik berisi energi, kekuatan, dan menghasilkan sesuatu daripadanya. Hal yang sama juga berlaku pada ruang dalam konteks spasial dan ruang sosial yaitu: '*Where there is space there is being*'. Lefebvre lantas

¹⁸ Lefebvre, *The Production of Space*; Translated by Donald Nicholson, vol. 29.

¹⁹ Lefebvre.

sampai pada satu argumen di mana dia dengan tegas menyatakan bahwa ruang sosial adalah produksi sosial. Dengan begitu, ruang diproduksi, dan dia juga dapat digunakan sebagai alat untuk berpikir dan bertindak; dia juga bisa menjadi sarana mode produksi, yang berarti sarana untuk kontrol, serta dominasi dari kekuasaan, dan lain sebagainya. Jika benar ruang sosial merupakan produk sosial, bagaimana ini bisa dibuktikan? Yakni dengan dua ilusi yaitu *The Illusion of transparency*, dan *the realistic illusion*.

Untuk dapat memahami ruang sosial sebagai produk sosial, Lefebvre menyajikan kerangka konseptual memengaruhi satu sama lain terus dan menerus secara berulang yakni *triadic of space*;

1. *Spacial Practices* atau Praktik Spasial

Ini mencakup beberapa hal, yakni produksi, reproduksi, lokasi tertentu, dan kumpulan karakteristik spasial dari setiap formasi sosial. Ruang pada tingkatan memiliki makna pada ruang yang dihidupkan oleh masyarakat lewat hubungan-hubungan mereka pada kegiatan sosial di atas ruang dalam konteks spasial tersebut. Ruang memang dari dulu sudah ada, hal ini dikatakan Lefebvre sebagai *absolute space*, di mana ruang absolut itu seperti hutan, sungai, dan lain sebagainya. Namun, ketika ada suatu kegiatan di dalam ruang tersebut, menjadikan kohesi sosial di dalam ruang-ruang dalam konteks spasial tersebut yang menjadikan ruang itu ada sebelum dia dikonsepsikan menjadi suatu ruang-ruang yang ada di perkotaan. Hal ini merujuk pada perkataan Lefebvre sebagai berikut: *"Like all social practice, spatial practice is lived directly before it is conceptualized; but the speculative primacy of the conceived over the lived causes practice to disappear along with life, and so does very little justice to the 'unconscious' level of lived experience per se"*²⁰

2. *Representation of Space* atau Ruang Representasi

Di sini ruang dimaksudkan dengan ruang secara abstrak atau *abstract space*, di mana ide atau pengetahuan tentang ruang bermain disini yang nantinya akan diproyeksikan ke ruang yang nyata.

"I would argue, for example, that representations of space are shot through with a knowledge (savoir) - i.e. a mixture of understanding (connaissance) and ideology - which is always relative and in the process of change. Representations of space are certainly abstract, but they also play a part in social and political practice: established relations between objects and people in represented space are subordinate to a logic which will sooner or later break them up because of their lack of consistency."

Ruang pada tingkatan ini, dinyatakan Lefebvre sebagai ruang yang dikonsepsikan atau *conceived space*, dan pada tingkatan ini, ruang sangat terikat terhadap relasi produksi yang mana membuat ruang hadir untuk disimbolkan atau dibuat kode-kode dan pengetahuan atau *knowledge*, mengambil peran daripadanya. Karena ruang pada tingkatan ini bentuknya masih abstrak dan ruang hanya merupakan sebuah konsep, disinilah para kapitalis, *urban planners*, ilmuwan, dan para teknokrat mengambil

²⁰ Lefebvre.hlm.34

perannya sehingga nanti dapat diproyeksikan ke dalam *lived space* yang hadir di tingkat *representational space*, sebagaimana Lefebvre menyatakan sebagai berikut; “*Conceptualized space, the space of scientists, planners, urbanists, technocratic subdividers and social engineers, as of a certain type of artist with a scientific bent. All of whom identify what is lived and what is perceived with what is conceived.*” (Lefebvre, 1991: 38).

Ruang-ruang yang sekarang ada di perkotaan sekarang ini, sebenarnya sudah melalui tahap pengkonsepan oleh beberapa aktor di dalam kota itu sendiri. Semenjak Lefebvre mengaitkan ilmu semiologi terhadap ruang, penulis melihat pandangan baru mengenai sebuah ruang. Jika ruang-ruang pada perkotaan tersebut tidak dikonsepan, kita tidak mungkin mengetahui apa sebenarnya ruang itu. Sebelumnya pada penjabaran di atas, Lefebvre sangat kritis terhadap ruang dengan mempertanyakan kenapa kita mengetahui jika ruang tersebut adalah kamar? Ruang tersebut didefinisikan karena fungsinya atau itu karena orang-orang mengkonsepsikannya sebagai kamar? Begitu pun dalam konteks perkotaan saat ini. Contoh lain yang menurut penulis bisa menggambarkan ruang pada tingkatan ini adalah, mengapa kita tahu ada sebuah ruang ditengah perkotaan dan ruang tersebut dibidang taman?

3. *Representational Space* atau Representasi Ruang

Ruang pada tingkatan ini meliputi penyimbolan yang kompleks, terkadang juga terdapat pengkodean dan terkadang juga ada yang tidak, ydan semua itu terhubung kepada kegiatan klandestin dan bawah tanah yang merupakan sisi lain dari kehidupan sosial. Ruang pada tingkatan ini dinyatakan Lefebvre sebagai ruang yang nyata atau *lived space*, karena didalamnya bersisi penggambaran, simbol, serta ruang dari penduduk kota. Ruang pada tingkatan ini juga dinyatakan sebagai *perceived space*, atau ruang yang dipersepsikan. Setelah ruang pada tingkatan sebelumnya telah dikonsepsikan oleh beberapa aktor seperti arsitek, *urban planners*, dan lain sebagainya, ruang-ruang yang ada di perkotaan sudah dapat dipersepsikan sendiri oleh masyarakat.

“This is the dominated - and hence passively experienced - space which the imagination seeks to change and appropriate. ' It overlays physical space, making symbolic use of its objects. Thus representational spaces may be said, though again with certain exceptions, to tend towards more or less coherent systems of non-verbal symbols and signs.”²¹

Dengan disajikannya kerangka konseptual yang dinyatakan Lefebvre sebagai *the triadic of space*, agaknya penulis mendapatkan pandangan baru mengenai sebuah ruang dan ruang sebagaimana konsep atas dirinya pada hari ini, tidak bisa dimakan mentah-mentah begitu saja sebagai bentuk ke arah urbanisasi dan modernisasi yang ditunjukkan dengan hadirnya pembangunan pada ruang-ruang di dalam perkotaan. Semenjak Lefebvre mengatakan ruang sosial berisi tindakan sosial dari individu maupun kolektif, pemikirannya tersebut menurutnya dapat dijadikan alat analisis terhadap kehidupan masyarakat. Sekarang agaknya kita mengetahui bahwa ruang-ruang yang terbentuk dalam perkotaan, tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah komoditas yang diperebutkan dan berisi kepentingan banyak pihak. Lefebvre menyatakan bahwa

²¹ Lefebvre.hlm.40

desain-desain ruang pada perkotaan yang jika kita menggunakan konsepsi Lefebvre berada pada tingkat *representation of space* atau ruang abstrak, digunakan oleh para kapitalis sebagai komoditas belaka dalam mode produksi;

“Capitalism and neocapitalism have produced abstract space, which includes the 'world of commodities', its 'logic' and its worldwide as well as the power of money and that of the political state. His 'trinity formula', according to which there were three, not two, elements in the capitalist mode of production and in bourgeois society. These three aspects or 'factors' were the Earth (Madame Ia Terre), capital (Monsieur le Capital), and labour (the Workers). In other words: rent, profit, and wages. This is especially needful at a time when capitalism, and more generally development, have demonstrated that their survival depends on their being able to extend their reach to space in its entirety: to the land (in the process absorbing the towns and agriculture, an outcome already foreseeable in the nineteenth century, but also, and less predictably, creating new sectors altogether- notably that of leisure).”

Jika ruang senantiasa diproduksi, bagaimana hal ini dapat terjadi? Lefebvre mengatakan bahwa kita harus berhadapan dengan sejarah jika ingin memahami hal ini dapat terjadi, di mana pada dasarnya secara historis, ruang merupakan produksi dari apa yang disebut Lefebvre sebagai “*qua reality*” dan hal tersebut merupakan bentuk serta representasi yang saling berhubungan satu sama lain. Namun, satu hal yang pasti adalah, kekuatan dari produksi (*nature; labour and the organization of labour; technology and knowledge*) dan relasi dari produksi tersebut lah yang bermain peran di dalam sebuah produksi ruang, di mana dalam setiap mode produksi, pastilah memproduksi ruang baru²². Melihat bagaimana ruang-ruang pada perkotaan sekarang ini ada, kenyataannya kita akan dihadapkan pada adanya kontradiksi manakala *conceived space* yang didesain oleh beberapa pihak tersebut menghadapi realitas bahwa segala yang didesain dan ditunjukkan tersebut tidak sejalan dengan keinginan mereka tatkala sudah masuk ke ranah yang nyata atau *lived space* dan dengan kata lain, proses dialektika *triadic of space* akan meninggalkan residu yang berbentuk permasalahan sosialnya sendiri.²³

Ruang-ruang yang telah didesain oleh beberapa aktor pada tingkat abstrak tersebut, sekarang banyak yang tidak sesuai dengan tujuannya. Hal ini dapat kita lihat dari fenomena kemunculan pedagang kaki lima yang masif hadir di tengah-tengah ruang perkotaan. Sekelas ruang-ruang perkotaan di DKI Jakarta seperti Kemang, Sudirman, Panglima Polim pun masih kerap ditempati para pedagang kaki lima ini. Padahal pada Pasal 25, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum telah terperinci dengan jelas bahwa pedagang kaki lima tidak dapat memanfaatkan fasilitas umum sebagai tempat berjualan, dan kecuali tempat yang telah ditetapkan Gubernur sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.²⁴

²² Lefebvre.

²³ Andi Setiawan, “Produksi Ruang Sosial Sebagai Konsep Pengembangan Ruang Perkotaan (Kajian Atas Teori Ruang Henry Lefebvre),” *Haluan Sastra Budaya* 33, no. 1 (2017): 11, <https://doi.org/10.20961/hsb.v33i1.4244>.

²⁴ Irfan and Achmad Edy Subiyanto, “EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MENGENAI LARANGAN MENGAMEN, MENGEMIS DAN PEDAGANG ASONGAN DI WILAYAH CENGKARENG JAKARTA BARAT,” *JCA of LAW* 1, no. 1 (2020).

Jika kita ingin meninjau lebih jauh kemunculan pedagang kaki lima ini, kebanyakan mereka adalah orang-orang desa yang mencoba mencari peruntungan di kota, yang tidak lain dan tidak bukan merupakan implikasi dari pembangunan yang tidak merata di dalam negara. Akibatnya, orang-orang perdesaan yang jauh dari proses urbanisasi dan pembangunan kota, mencoba meraih remah-remah kue dari proses pembangunan di perkotaan yang inchi demi inchi setiap ruang di perkotaan kota tersebut, sarat dengan kepentingan berbagai pihak. Didik J. Rachbini, memandang bahwa proses pembangunan yang tidak merata tersebut, diikuti dengan ketidaksadaran untuk memberikan susana dan peluang sehingga mereka tidak dapat berpartisipasi.²⁵ Dengan sedikit harapan dan tidak mempunyai kantung yang tebal, para pedagang kaki lima ini nekat merantau ke kota hanya dengan bermodalkan keahlian dan badan mereka.

Semenjak ruang-ruang perkotaan yang tidak diperuntukan bagi kelompok marjinal ini dibentuk pada ruang abstrak, akhirnya manakala menghadapi ruang nyata atau *lived space*, pedagang kaki lima tersebut memilih untuk menggunakan ruang-ruang kota tadi untuk berjualan, padahal tujuan terbentuknya ruang tersebut sebenarnya bukan itu. Pada konteks di Grand Depok City dan Sekitar Jalan Margonda, terlihat banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di sekitaran bangunan-bangunan yang mempunyai nilai ekonomis seperti gedung kampus, taman-taman kota, bahkan perumahan elite. Sebenarnya dalam konteks kota di Depok, Peraturan daerah yang mengatur mengenai ketertiban pada ruang kota ini ada di Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban. Jika kita membaca bagian kelima Pasal 14 tentang tertib usaha dan penjualan, ada ayat yang penulis tengarai sebagai ayat yang multitafsir, di mana pada ayat 2 tertulis sebagai berikut;

(2) Setiap orang atau badan dilarang berjualan di jalur hijau, taman kota, dan tempat umum lainnya kecuali diizinkan oleh pejabat yang berwenang.

Dari ayat diatas kita bisa melihat bahwa, para pedagang ini sebenarnya boleh menggunakan ruang-ruang kota untuk berjualan, dengan prasyarat telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Jika merujuk pasal 1 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 tersebut yang dimaksud pejabat berwenang adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya dalam konteks ini Walikota Depok menugaskan Satpol PP. Pada 2019, sejatinya di jalan GDC ini sudah dilakukan penertiban, senada dengan apa yang dikatakan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Depok, Taufiqkurahman, dengan mengirimkan 200 personel Satpol PP ke sekitaran kawasan GDC²⁶. Menurut penulis, memang mereka di satu sisi menggunakan ruang-ruang publik yang sebelumnya sudah diatur dalam perda untuk dijadikan tempat berjualan, penulis juga tidak menampik bahwasanya mereka kerap mengganggu ketertiban jalan, namun

²⁵ Muhammad Hayat, "Strategi Bertahan Hidup Pedagang Kaki Lima (PKL)," *Sosiologi Reflektif* 6, no. 2 (2012): 1–11.

²⁶ Indri Purnama, "Satpol PP Depok Lakukan Penataan PKL di Jalan Boulevard GDC" . Retrieved 06 29, 2021, from berita depok: <https://berita.depok.go.id/unggulan/satpol-pp-depok-lakukan-penataan-pkl-di-jalan-boulevard-gdc-404> ,(2020).

dengan dihadapkan langsung dengan penggusuran dagangan, sampai diangkutnya barang oleh Satpol PP.

Menilik fenomena pedagang kaki lima ini, ternyata mereka juga memiliki pola persebaran tersendiri, di mana Mc Gee dan Young, mengklasifikasi pola penyebaran para pedagang kaki lima ini menjadi beberapa pola yakni pola linear memanjang, pola pelayanan (biasanya mudah dibawa dan ada pula yang menetap), dan pola pengelolaan (biasanya menempati lokasi tertentu yang telah ditetapkan pemerintah kota²⁷. Dalam penelitian karya Muhamad Hayat yang berjudul Strategi Bertahan Hidup Pedagang Kaki Lima di Tahun 2012, menggunakan pemikiran Emile Durkheim sebagai alat analisisnya, dia melihat bahwa para pedagang ini membentuk solidaritas mekanik di mana terdapat kesadaran bersama dalam satu kelompok tersebut yang mana sama-sama pedagang kaki lima lain dan hal ini perasaan kolektif tersebut menjadi landasan untuk bergerak dan bertindak.²⁸ Selain itu, menurut Hayat²⁹, para pedagang kaki lima juga membentuk sebuah sistem sosial (*social systemness*) di mana mereka punya perasaan senasib dan sepejuangan karena pola-pola ekologis perkotaan, dan hal tersebut membuat mereka saling ketergantungan antar satu sama lain. Tidak heran kalau kekerabatan mereka sangat erat jika bertentangan dengan peraturan kota.

Di samping hal tersebut, kita juga bisa melihat pada gambar di atas, di mana para pedagang kaki lima banyak sekali menempati ruang di sudut-sudut perkotaan yang tidak seharusnya dijadikan tempat berjualan. Sekali lagi, ini merupakan gambaran nyata bagaimana jika menggunakan kerangka konseptual Lefebvre *triadic of space*, ketiga ruang tersebut memang saling berdialektika. Manakala para *urban planners*, kapitalis bahkan para pejabat kota sudah merencanakan setiap ruang pada kota, maka mereka pun tidak dapat mengendalikan apa yang akan terjadi pada *lived space*.

3. Kebijakan Ideal Kota Terhadap Pedagang Kaki Lima

Kenyataan pahit bahwa pedagang kaki lima terus-menerus menerima perlakuan tidak menyenangkan dari pemerintah kota ataupun desa, memang tidak bisa dilepaskan dari implikasi urbanisasi dan para kapitalis yang turut mengkampanyekan imaji kehidupan ideal warga perkotaan. Ini mengingatkan pada argumentasi Theodore Adorno³⁰, yang menjadi bagian dari mazhab Frankfurt yang memberikan kritik secara tajam terhadap budaya populer atau budaya massa yang dikembangkan dan diproduksi secara terus menerus dalam kehidupan masyarakat kapitalis modern. Menurutnya, budaya massa yang dikonsumsi masyarakat hari ini adalah bentukan kapitalis yang bertujuan untuk mengeksploitasi masyarakat agar dapat mendapatkan profit lewat produk surplus mereka.³¹ Melalui budaya massa, kapitalis mencoba menggiring pemikiran masyarakat bahwa tindakan konsumerisme terhadap komoditas adalah

²⁷ Kurniawan, "Pola - Pola Pemanfaatan Trotoar Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan Mangga Besar - Jakarta."

²⁸ Hayat, "Strategi Bertahan Hidup Pedagang Kaki Lima (PKL)."

²⁹ Hayat.

³⁰ Tom Bottomore, *Mazhab Frankfurt Gagasan Dan Kritik* (Penerbit Independen, 2019).

³¹ Bottomore.

segala-galanya, dan Adorno menggunakan konsep dari Marx untuk menggambarkan hal tersebut sebagai fethisisme komoditas. Dalam tingkat perkotaan, banyak sekali dipertontonkan lewat media sosial mengenai gaya hidup ideal perkotaan dengan segala fasilitas mewah seperti bangunan sarana rekreasi, mall mewah di tengah kota, kafe yang nyaman dengan segala aktivitas masyarakat urban kekinian, serta berbagai bangunan yang dianggap dapat melepaskan hasrat diwaktu luang (*leisure*) masyarakat terhadap kelelahan setelah lama beraktivitas dalam kota seperti *staycation* dan hotel mewah. Sementara kesadaran kita digilas oleh terminologi kota 'modern' oleh para *urban planners* serta arsitektur kota dengan konsep bangunan yang baru dan belum pernah kita lihat sebelumnya, ada masyarakat menengah ke bawah yang penulis pikir sangat sulit untuk mencari nafkah karena harus berjuang melawan berbagai kepentingan yang ada di dalam kota, khususnya jika ingin menggunakan ruang publik sebagai tempat mereka berjualan.

Ironisnya, tidak hanya berjibaku dengan para aktor yang berwenang seperti RT/RW untuk mendapatkan izin berdagang, mereka juga harus melewati kepentingan para aktor informal yang kerap mengeksploitasi diri mereka seperti preman serta ormas dengan dalih 'uang keamanan'. Yang menarik juga dari hal tersebut adalah, preman atau '*free man*' ini juga tidak bisa dilepaskan dari proses urbanisasi yang terjadi dalam konteks kota di Indonesia. Ian Douglas dalam bukunya "Politik Jatah Preman", menyebutkan bahwa munculnya fenomena premanisme, tidak bisa dilepaskan dari proses urbanisasi. Sejak 1960-an, pertumbuhan ekonomi Indonesia dicirikan oleh pengalihan penggunaan lahan tani untuk kepentingan perkotaan. Urbanisasi yang didorong keterbelakangan desa, aktivitas industri dalam negeri, hingga kucuran dana asing ke ibukota, membuat lowongan pekerjaan sektor formal menjadi cepat diisi dan lambat laun menyebabkan banyak pengangguran di kota, sehingga premanisme kerap muncul dari kegiatan-kegiatan ekonomi informal oleh warga urban yang benar-benar miskin, bahkan menengah.³² Sekali lagi kita dihadapkan dengan dampak urbanisasi yang nyata terhadap masyarakat kota, khususnya masyarakat miskin kota.

Lalu pertanyaanya, sampai di satu tingkat tentang bagaimana kebijakan ideal yang seharusnya bagi para pedagang kaki lima ditengah kota ini, apakah harus terus menerus diadu dengan Satuan Polisi Pamong Praja atau terus menerus dieksploitasi para preman dengan dalih uang keamanan? Di mana peran pemerintah kota seharusnya? Penulis berpikir, ada satu kebijakan menarik yang bisa dipraktikkan pemerintah kota untuk menengahi fenomena ini, yakni dengan menyediakan satu pusat jajanan, bisa dalam bentuk wilayah atau jalan yang di sepanjang jalan itu berisi dengan jajanan yang nantinya diawasi oleh aparat penertiban. Misalnya di suatu daerah dekat pembangunan kota, sediakan saja pusat jajanan di dekatnya, dengan syarat, para pedagang ini hanya cukup membayar uang kebersihan kepada pemerintah kota. Di satu sisi mereka juga akan terbebas dari premanisme dan ormas-ormas yang sering mengeksploitasi mereka, dan di sisi lain mereka juga tidak perlu berjibaku dengan Satpol PP. Melihat negara Asia lain seperti Singapura, Korea, dan Jepang yang telah

³² Ian Douglas Wilson, *Politik Jatah Preman: Ormas Dan Kuasa Jalanan Di Indonesia Pasca Orde Baru* (Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2018).hlm.47-50

menerapkan konsep seperti ini, saya yakin di tingkat kota seperti DKI Jakarta juga akan bisa, nantinya kota-kota satelitnya seperti Tangerang, Depok, Bogor, dan Bekasi pasti akan mengikutinya.

D. KESIMPULAN

Pembahasan mengenai fenomena pedagang kaki lima di tengah masifnya pembangunan pada ruang-ruang perkotaan memang tidak bisa kita ambil pandangan yang simpel dari pada hal tersebut. Fenomena tersebut bukan hanya dilihat sebagai kegiatan sektor informal kelas menengah ke bawah dalam perkotaan untuk mencari nafkah, lantaran tidak dapat bersaing di tengah proses urbanisasi hari ini. Dengan menggunakan teori Produksi ruang dari Lefebvre kita menjadi sadar bahwasanya ruang yang selama ini kita persepsikan yang berada di tengah-tengah kota, sejatinya merupakan ruang yang terlebih dahulu dikonsepsikan oleh beberapa aktor seperti arsitek, *urban planners*, kapitalis, serta pejabat-pejabat dalam kota. Ruang secara spasial, dibentuk oleh kegiatan masyarakat secara individual maupun kolektif, sebenearnya merupakan arena pertentangan yang berisi berbagai macam kepentingan agar ruang dapat didominasi, lebih jauh ruang oleh kapitalis dihegemoni lewat ilmu pengetahuan tentang kota. Fenomena pedagang kaki lima yang berjualan di ruang-ruang perkotaan seperti di sekitar Grand Depok City atau Margonda pada Tahun 2021, merupakan kenyataan bahwa, proses *triadic* yang dinyatakan oleh Lefebvre tersebut, antara *practical space*, *representation of space*, dan *representational space*, akan selalu meninggalkan residu yang berbentuk permasalahan sosialnya sendiri. Sebagaimana *conceived space*, akan selalu bermasalah tatkala dihadapkan dengan *perceived space*, ditunjukkan dengan kehadiran pedagang kaki lima yang muncul pada ruang-ruang perkotaan.

Penulis menyadari bahwa memang para pedagang kaki lima ini mengganggu jalan umum, dan kerap bermunculan secara sporadis di tengah-tengah ruang kota, namun sekali lagi, mereka sejatinya juga merupakan manusia yang mencoba mengais pendapatan akibat urbanisasi yang semakin menyudutkan mereka dengan segala konsekuensinya. Pembangunan yang tidak merata diiringi dengan keacuhan para pejabat kota, kerap menjadikan sektor informal menjadi satu-satunya pilihan di kala masyarakat marjinal ini dapat bertahan hidup, yakni dengan berjualan. Mereka memilih ruang-ruang publik tersebut bukan tanpa alasan, karena untuk menyewa tempat di perkotaan, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Penulis menyarankan agar pemerintah setingkat kota bahkan nasional, dapat menaruh mata pada fenomena ini. Warga kota haruslah diberikan kesempatan dan tidak mendiskriminasi suatu kelas saja. Kelompok marjinal ini hanya perlu diberikan pelatihan dan peluang agar bisa bersaing dengan yang lainnya. Penulis berharap juga, agar kota-kota di Indonesia dapat memperhatikan warga kotanya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan warganya, bukan dengan sebaliknya, yaitu dieksploitasi dan dipinggirkan.

REFERENSI:

Bottomore, T. (2019). *Mazhab Frankfurt Gagasan dan Kritik*. Penerbit Indepen.

- Christian, Y., & Desmiwati. (2018). Menuju Urbanisasi Pulau Kecil: Produksi Ruang Abstrak dan Perampasan. *Journal of Regional and Rural Development Planning, 2* (1), 45-63.
- Farida, N. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*.
- Harvey, D. (1996). Cities or urbanization? *City, 1:1-2, 38-61, , City, 1:1-2, 38-61*, DOI: 10.1080/13604819608900022.
- Harvey, D. (2017). The Right to the City. In D. Simpson, V. Jensen & A. Rubing (Ed.), *The City between Freedom and Security*. pp. 156-171
<https://doi.org/10.1515/9783035607611-014>.
- Hayat, M. (2012). Strategi Bertahan Hidup Pedagang Kaki Lima (PKL). *SOSIOLOGI REFLEKTIF, Volume 6, Nomor 2*, 61-73.
- Hendra, D. (2018). ANALISIS PEMIKIRAN HENRI LEVEBVRE TENTANG RUANG DALAM ARSITEKTUR MODERN: SUATU PERSPEKTIF SOSIOLOGIS. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, 17*(2), 178-189.
- Irfan, & Subiyanto, A. E. (2020). Efektifitas Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Mengenai Larangan Mengamen, Mengemis Dan Pedagang Asongan Di Wilayah Cengkareng Jakarta Barat. *JCA of LAW, 1*(1).
- KBBI. (n.d.). *Urbanisasi KBBI*. <https://kbbi.web.id/urbanisasi>
- Kurniawan, F. (2019). Pola - Pola Pemanfaatan Trotoar Oleh Pedagang Kakilima Di Jalan Mangga Besar – Jakarta. *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran, dan Ilmu Kesehatan Vol. 3, No. 1*.
- Lefebvre, H. (1991). *The Production of Space, Translated by Donald Nicholson-Smith*. Oxford: Basil Blackwell.
- Nassaji, H. (2015). Qualitative and descriptive research: Data type versus data analysis. *Language Teaching Research, 19*(2), 129–132.
<https://doi.org/10.1177/1362168815572747>
- Pamungkas, A. S. (2016, 01 11). *Produksi Ruang dan Revolusi Kaum Urban Menurut Henri Lefebvre*. Dipetik 06 27, 2021, dari Indoprogess:
<https://indoprogess.com/2016/01/produksi-ruang-dan-revolusi-kaum-urban-menurut-henri-lefebvre/>
- Purnama, I. (2020). *Satpol PP Depok Lakukan Penataan PKL di Jalan Boulevard GDC*. Retrieved 06 29, 2021, from berita depok:
<https://berita.depok.go.id/unggulan/satpol-pp-depok-lakukan-penataan-pkl-di-jalan-boulevard-gdc-404>
- Putra, G. A., & Triwahyono, D. (PAWON: Jurnal Arsitektur, Volume 1 Nomor 1). PRIVATISASI DALAM RUANG PUBLIK Studi Kasus: Taman Merbabu Malang. *PRIVATISASI DALAM RUANG PUBLIK*, 2002.
- Statistik Sektor Provinsi DKI Jakarta. (2021). *Penduduk Miskin di DKI Jakarta Tahun 2020*. <https://statistik.jakarta.go.id/penduduk-miskin-di-dki-jakarta-tahun-2020/>

- Setiawan, A. (2017). Produksi Ruang Sosial Sebagai Konsep Pengembangan Ruang Perkotaan (Kajian atas Teori Ruang Henri Lefebvre). *Haluan Sastra Budaya*, 33(11).
- Sulistiyorini, A. (2020). DARI URBANISASI KE RURALISASI. *MONAS: Jurnal Inovasi Aparatur Vol 2 No 1*, 145-162.
- Widyaningrum, N. (2009). Kota dan Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Analisis Sosial Vol.14 (1)*.
- Wilson, I. D. (2018). *Politik Jatah Preman: Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca Orde Baru*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.
- Yamuna, N. T., Punia, I., & Mahadewi, N. A. (2019). Produksi Ruang Sosial Pedagang Kaki Lima di Lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. *Jurnal Universitas Udayana*.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.